

KONSTRUKSI BUDAYA MASYARAKAT JAWA : STUDI TERHADAP NILAI BUDAYA KEMISKINAN MASYARAKAT MUSLIM MALANG JAWA TIMUR

Agus Purwadi, Umiarso*

Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

*umiarso@umm.ac.id

DOI: 10.33852/jurnalin.v4i2.219

Received: July 2020

Accepted: November 2020

Published: December 2020

Abstract :

This article focuses on constructing a culture of poverty that is motivated by religious attitudes in Malang, East Java. They consider poverty to be given human reality, and its existence cannot be shifted and changed. Based on this focus, this research takes a qualitative research approach with the type of phenomenology. This research uses Loren Demerath's Knowledge-Based Affect Theory as a perspective. Meanwhile, to analyze the research data using interactive analysis by Miles and Hubermann. This research finds that the views, attitudes, and actions of the poor emerge and imbued with Javanese expressions and are associated with religious doctrine interpretation. They consider mental fatalistic (nrimo ing pandum) to be the same as religious values such as patience and sincerity so that poverty is considered the destiny of God. This mentality position as legitimacy for their poverty. Even their views inspire the orientation of economic behavior, which they wrap with a spiritual dimension. The primary purpose of their life does not lie in material attainment but lies in the harmonization of life in society

Key words : Culture, Poverty, and Views of life

Abstrak :

Artikel ini memfokuskan pada konstruksi budaya kemiskinan yang dilatarbelakangi oleh sikap keberagamaan di Masyarakat Malang Jawa Timur. Mereka menganggap kemiskinan merupakan realitas kemanusiaan yang bersifat given dan keberadaannya tidak bisa di geser serta diubah. Berdasarkan fokus inilah, riset ini mengambil pendekatan riset kualitatif dengan jenis fenomenologi. Riset ini menggunakan Knowledge-Based Affect Theory yang dicetuskan Loren Demerath sebagai perspektif. Sedangkan untuk analisa data riset ini menggunakan analisis interaktif Miles dan Hubermann. Riset ini menemukan bahwa pandangan, sikap maupun tindakan masyarakat miskin muncul dan dijiwai ungkapan-ungkapan Jawa dan dikaitkan dengan hasil intepretasi doktrin keagamaan. Mereka menganggap mental fatalistik (nrimo ing pandum) sama dengan nilai keberagamaan seperti sabar dan ikhlas, sehingga kemiskinan dianggap sebagai takdir Tuhan. Mentalitas ini diposisikan sebagai legitimasi atas kemiskinan mereka. Bahkan pandangan-pandangan mereka menginspirasi orientasi perilaku ekonomi yang mereka balut dengan dimensi spiritual. Tujuan utama kehidupan mereka bukan terletak pada pencapaian materi, namun terletak pada harmonisasi hidup di tengah masyarakat.

Kata Kunci : Budaya, Kemiskinan, dan Pandangan Hidup

PENDAHULUAN

Riset ini fokus pada latar belakang munculnya budaya kemiskinan di tengah masyarakat Jawa. Mengapa kemiskinan? Sebab ia merupakan masalah serius yang dihadapi dunia saat ini (Green, 2008; Latifah, 2011; Rusman Rasyid & Mohd. Fuat Mat Jali, 2014; Tim Penulis, 2009), terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan praktik-praktik pengaturan melalui tindakan perencanaan (Baharun, 2019), mengubah tata lingkungan, penghidupan, dan jati diri masyarakat mereka (Tania Murray Li, 2012). Problematika kemiskinan memang sangat memprihatinkan, berimplikasi pada berkembangnya persoalan-persoalan lain seperti munculnya depresi, berbagai penyakit, serta kelaparan yang merajalela (Anthony Elliott & Charles Lemert, 2006). Begitu pula di tengah-tengah masyarakat Jawa seperti masyarakat Malang Jawa Timur –selanjutnya akan ditulis MMJT- yang sebagian masih berada di pusaran kemiskinan tidak lepas dari persoalan tersebut. Karenanya, secara kesejahteraan MMJT memiliki ketimpangan yang lebar antara masyarakat kaya dan miskin. Termasuk pula ketika dilihat dari aspek tingkat pendidikan, sehingga mereka cenderung relatif mempunyai pengetahuan dan keterampilan (*skill*) yang rendah.

Kondisi MMJT tersebut bisa dikatakan sebagai akibat dari rentetan pola kebijakan. Artinya, kemiskinan yang masih mendera MMJT tidak lepas dari faktor struktural, yakni sistem perekonomian yang tidak egalitarian, kondisi politik yang dehumanistik atau kebijakan pemerintah yang tidak memihak terhadap rakyat kecil, seperti yang disinyalir dalam riset Maulana (Maulana, 2019). Kondisi ini terbentuk karena struktur masyarakat tertentu –baca komunitas tertentu di tengah-tengah MMJT- menguasai sumber pendapatan, sehingga ada masyarakat lain yang tidak mampu untuk menggunakan sumber pendapatan tersebut. Secara internalitas, MMJT mempunyai potensi untuk keluar dari pusaran kemiskinan, namun mereka, seperti yang dikatakan Berger, sedang mengalami penghisapan oleh sistem kapitalis secara menyeluruh, dan oleh agen-agen imperialis tertentu, baik asing maupun dari dalam negeri (Berger, 2004). Paradigmatik teoritik ini dalam disiplin ilmu sosiologi sering dikatakan sebagai teori imperialisme, sehingga konseptualisasi yang sering muncul adalah konsep “*development of under-development*” atau “pembangunan keterbelakangan”.

Namun di sisi yang lain, kemiskinan MMJT tidak lepas dari faktor budaya yang membentuk kepribadian diri masyarakat, seperti sikap irasional, memiliki mitos yang kuat, berorientasi pada masa lalu, dan bergantung pada alam. Ada pula mental diri MMJT berupa perasaan dan pemikiran yang menganggap dirinya berada dalam lingkup keterbatasan relasional, material, intelektual, emosional, dan spiritual. Karenanya, mereka memiliki mental fatalistik (*nrimo ing pandum; taken for granted*) yang setiap saat membelenggu dan berkubang di tengah kemiskinan. Riset Andayani, dkk menyatakan, perasaan dan pemikiran yang demikian merupakan representasi dari kemiskinan subjektif (Andayani & dkk., 2019). Bahkan dalam riset Masrial menyimpulkan bahwa sikap fatalistik menjadi penyebab kemiskinan (Masrial, 2018).

Pada titik inilah, kemiskinan MMJT seolah-olah bukan persoalan dalam kehidupan mereka, tetapi ia dianggap merupakan fakta yang bersifat *given* dan tidak bisa diubah keberadaannya. Anggapan ini membawa MMJT pada, yang disebut Anthony Giddens sebagai kemiskinan mutlak, yaitu suatu situasi ketika manusia secara teratur tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang paling mendasar (Giddens, 2009). MMJT seringkali tidak menyadari munculnya sikap irasional dan keberagamaan yang berbaur mitos cenderung mengikat diri mereka mulai dari dimensi kesadaran dan kekritisannya. Bahkan tidak dianggap sebagai permasalahan substansial dalam kehidupan mereka. Seakan-akan MMJT tidak memahami pandangan Islam, seperti yang diungkap dalam artikel Ulya, Islam mengajurkan bekerja keras, adanya redistribusi pendapatan berupa zakat, infaq dan sedekah (Husna Ni'matul Ulya, 2018); dan melarang monopoli dan menimbun harta (Ulfi Putra Sany, 2019).

Kenyataan ini seringkali mengacu pada terbentuknya suatu budaya kemiskinan (*culture of poverty*) dalam MMJT, yaitu suatu kondisi di mana orang-orang miskin hidup dalam suatu subkultur; dan sebagai akibat adanya kesamaan pengalaman, mereka memiliki sikap dan pola-pola tertentu yang diwariskan kepada anak-anaknya (Paul B. Horton & Chester L. Hunt, 1990). Sikap dan pola-pola keberagamaan yang berbaur mitos dan kependidikan yang tidak kritis serta irasional mengkristal menjadi mentalitas kolektif yang memicu munculnya budaya kemiskinan di MMJT. Padahal untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi masyarakat marginal –baca masyarakat miskin- salah satunya adalah tercapainya aspek keberagamaan dan kependidikan (Lailul Ilham & Farid, 2019). Pada konteks ini adalah keberagamaan yang mencerahkan dan bersifat berkemajuan; sedangkan kependidikannya mampu menumbuhkan kembangkan keterampilan dan membuka wawasan keilmuannya (Dakir & Fauzi, 2019). Hal ini dapat dikatakan, aspek keberagamaan dan kependidikan mempunyai pengaruh terhadap budaya kemiskinan masyarakat –terutama di MMJT.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada pernyataan penelitian yang muncul di dalam konteks riset tersebut, maka riset ini difokuskan pada konstruksi budaya kemiskinan yang dilatarbelakangi sikap keberagamaan MMJT. Fokus ini memunculkan pertanyaan, yaitu: bagaimana sikap keberagamaan MMJT yang menyebabkan dan/atau menumbuhkan budaya kemiskinan?; dan bagaimana solusinya agar bisa keluar dari budaya kemiskinan tersebut?. Karenanya, riset ini menggunakan pendekatan kualitatif yang pengumpulan datanya melalui teknik interview dan observasi; dan untuk analisa data, peneliti menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Sosial dan Diversitas Pandangan Hidup MMJT

Pada dasarnya pandangan hidup orang Jawa secara general atau MMJT secara khusus bisa dipahami oleh seluruh lapisan kelompok sosial. Salah satunya adalah prinsip harmonis yang dihayati MMJT mulai dari lapisan atas dan bawah secara bersamaan serta menjadi pokok dari seluruh bentuk

kebudayaan. Korban materi bagi yang kaya atau korban tenaga bagi yang miskin merupakan artikulasi dari prinsip harmoni atau keseimbangan tersebut. Jika salah satu mangkir atas kewajibannya, maka keseimbangan akan terganggu dan dapat mengguncangkan kestabilan sosial. Namun demikian, keseimbangan tersebut merupakan kondisi laten dari proses pertentangan dan bukan sebuah kompatibilitas dari organ-organ sistem sosial yang ada di MMJT.

Sebagai sebuah kondisi ideal dan dicita-citakan MMJT, pandangan hidup merupakan muatan dasar yang bersifat normatif dan ia menjadi panutan perilaku setiap anggota masyarakat. Pandangan hidup ini, menurut Muller merupakan kompleks timbal balik antara institusi sosial dengan struktur mental (dimensi tindakan sosial) dan struktur sosial (dimensi sistem sosial) masyarakat (Johannes Muller, 2006). Wajar jika salah satu riset menyimpulkan, masyarakat Jawa merupakan satu kesatuan tatanan kemasyarakatan yang diikat norma hidup, tradisi, dan juga agama (M. Muslich, 2004). Pun begitu kehidupan MMJT terikat dengan struktur mental dan sosial yang mampu mempengaruhi pola pikir dan tindakan anggota masyarakat.

Di sisi yang lain, dua dimensi tersebut dipengaruhi struktur kebudayaan sebagai fungsi timbal-balik antara institusi sosial dan struktur kebudayaan itu sendiri. Institusi sosial merupakan kompleksitas fungsi dari nilai-nilai, ide-ide, dan norma-norma; di mana pandangan hidup MMJT merupakan inspirasi utama yang melekat kuat pada diri anggota masyarakatnya. Ditambah lagi, institusi sosial dan mekanisme yang memperkuat struktur sosial dan mentalitas tidak menutup ruang adanya pengaruh dan tekanan dari luar. Oleh karenanya, kemiskinan di MMJT terbentuk dari pengaruh luar berupa mentalitas kapitalisme penjajah yang kuat terpatri. Walaupun demikian, peneliti menilai, pengaruh luar itu tidak lebih sebagai kontributor semata. Selebihnya, struktur kebudayaan MMJT sendiri (seperti nilai dan norma yang telah diproduksi kalangan elit) ternyata membentuk struktur mentalitas dan sosial. Walaupun pada satu sisi, seperti simpulan riset Lubis, setiap individu di masyarakat memiliki peran aktif dalam membentuk sisi kebudayaan (Lubis, 2011).

Berdasarkan deskripsi tersebut jelas bahwa pandangan hidup MMJT pada dasarnya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap konstruksi kemiskinan. Fakta riilnya, fluktuasi kehidupan MMJT sangat dinamis dan cenderung menggeser tata kemasyarakatan. Dalam proses yang bersifat dinamis ini, semua unsur pokok dari MMJT saling mempengaruhi dan juga membentuk mentalitas setiap individu. Oleh karenanya, MMJT terus menerus berada di tengah proses tersebut dan ia tidak pernah bisa lepas dari kenyataan empiris masyarakat. Namun menariknya, pandangan hidup MMJT merupakan kompleksitas budaya yang sangat unik dan memiliki dimensi sosiologis yang luas. Padangan hidup mereka lahir dari proses interaksi sosial sehari-hari dan memberi inspirasi berbagai tindakan sosial orang MMJT. Pandangan hidup juga menginspirasi sistem sosial tertentu yang dibangun oleh MMJT seperti tata krama keseharian atau bahkan pada keberagamaan MMJT. Lazim jika pandangan hidup MMJT mampu menginspirasi orientasi mereka dalam perilaku ekonomi. Bahkan berbagai sanksi, aturan, simbol keberagamaan, ritualitas, dan juga nilai tertuang dalam simbol tindakan dan ungkapan

mereka. Semua dimensi budaya mereka terbentuk dari hasil karya anggota MMJT yang terikat kuat dengan pandangan-pandangan hidup mereka. Oleh karenanya, ia bisa disebut sebagai wujud diri orang MMJT yang sarat dengan orientasi-orientasi spiritual. Keadaan ini juga dinyatakan dalam simpulan riset Adim bahwa dimensi spiritual mampu mempengaruhi perilaku ekonomi serta menghantarkannya ke wilayah keberagaman hingga menyentuh alam imajinal, yaitu: alam rohani dan jasmani (Abd. Adim, 2019).

Pada dasarnya pandangan hidup MMJT bersifat umum dan berlaku untuk seluruh golongan masyarakat. Namun, produk dari nilai-nilai keagamaan tidaklah secara merata lahir sebagai representasi seluruh komponen dalam masyarakat. Justru nilai-nilai keberagaman melahirkan perilaku sosial yang terbentuk dari pandangan hidup mereka. Menariknya, di MMJT orientasi nilai lebih condong pada pembenaran pandangan kelompok sosial tertentu terutama komunitas kelas atas. Oleh karena itu, kerap kali pandangan hidup yang sifatnya sangat filsafati merupakan wujud dari orientasi komunitas kelas atas di MMJT. Secara sosiologis, kelas sosial ditentukan oleh tiga variabel, yaitu: kekayaan (*wealth*), kekuasaan (*power*) dan kehormatan (*prestige*). Sehingga di masyarakat muncul postulasi, semakin tinggi kelas sosial seseorang maka semakin tinggi pula peluang hidup (*life change*) dan gaya hidupnya (*life style*) (James M. Henslin, 2007).

Pandangan hidup MMJT sendiri pada dasarnya tidak netral yang berlaku pada seluruh lapisan sosial masyarakat. MMJT sendiri secara tradisional dibagi atas dua lapisan sosial, yakni: para bangsawan/priyayi dan wong cilik (proletar). Bangsawan merupakan representasi dari para keturunan para pejabat dan para pegawai pemerintah; sedangkan wong cilik (proletar) merupakan representasi orang kebanyakan yang dari dimensi ekonomi berada di level bawah. Tidak hanya itu, di dalam MMJT secara keseluruhan juga dikenal istilah *wong kutho*, *wong nggunung*, dan *wong pesisir*. *Wong kutho* merujuk pada orang-orang yang berdomisili di ibukota kabupaten; dan *wong nggunung* merujuk pada orang-orang desa yang tinggal jauh dari pusat kabupaten; serta *wong pesisiran* yang merujuk pada para nelayan di pantai. Kedua terakhir inilah merupakan kelompok masyarakat yang masuk dalam lapisan sosial di bawah para bangsawan (Endaswara, 2006).

Masing-masing kelompok sosial tersebut memiliki nilai dan norma -baca budaya- berbeda yang ditunjukkan oleh berbagai pola atau gaya hidup. Kelompok atas mempunyai gaya hidup, pola perilaku, dan simbol-simbol yang menunjukkan gaya aristokrat. Sedangkan budaya *wong cilik* mempunyai gaya hidup yang lebih kasar, terbuka, dan polos. Gaya hidup tersebut merupakan perwujudan dari budaya pedesaan yang sangat kental dengan nuansa kekeluargaannya. Wajar jika di MMJT, struktur sosial yang berlapis tersebut begitu melekat dan muncul pula hak dan kewajiban tertentu. Kelas atas mempunyai hak yang luas dan wong cilik memiliki kewajiban yang relatif banyak. Seakan-akan ada aturan, jika *wong cilik* akan terus tergantung pada kelas atas melalui hubungan patron klien yang kuat. Sehingga sangat sulit bagi *wong cilik* untuk dapat naik status sosialnya karena tidak adanya kesempatan yang terbuka secara luas.

Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan stigma budaya, kemiskinan merupakan takdir yang konstan dan tidak dapat diubah. Peneliti melihat, kelas atas seringkali melakukan konsolidasi kekuasaan melalui jalur perkawinan dan aliansi-aliansi politik untuk mengekalkan kekuasaan dan posisinya. Karenanya, *wong cilik* tetap berada diposisinya yakni menjadi pelayan bagi kelas atas sebab ia mempunyai ketergantungan ekonomi. *Wong cilik* identik dengan kemiskinan, sementara kelas atas identik dengan kekayaan dan kekuasaan. Pada konteks ini, ada keselarasan dengan simpulan riset Warto bahwa kemiskinan bagi kalangan bawah disikapi dengan *nrimo ing pandum* (berserah pada nasib) (Warto, 2015).

Pembagian kelas sosial MMJT tersebut juga memunculkan perbedaan pandangan hidup antara kelas atas dan *wong cilik*. Meski dalam satu kelompok masyarakat (yaitu MMJT), antar lapisan sosial tersebut terlihat ada perbedaan yang mencolok. Pandangan-pandangan keadiluhungan begitu banyak dikenalkan pada kelas atas, sementara kebudayaan *nrimo ing pandum* begitu dikembangkan dikalangan *wong cilik*. Begitu kuatnya keadiluhungan yang ditanamkan pada kalangan kelas atas berimplikasi terhadap psikologis dan juga intelektualitas diri mereka. Wajar jika alur perkembangan pemikiran kebijaksanaan hidup MMJT lebih banyak dimunculkan dari lapisan sosial kelas atas.

Artinya, pemikiran kefilosofan dikembangkan sebagai garapan kelas atas, serta “menjejalkan” secara kultural kepada kalangan *wong cilik*. Kondisi ini tanpa disadari telah berlangsung relatif lama dan juga membentuk stigmatik di MMJT bahwa *wong cilik* merupakan lapisan sosial yang terbelakang dan “tidak bisa berbuat apa-apa”. Hal ini dapat dilihat dari fakta sejarah bahwa kitab-kitab karangan para pujangga Jawa merupakan representasi kelas elit di dalam masyarakat Jawa. Kitab-kitab sejarah maupun setengah sejarah pada abad ke-19 seperti Pararaton, Negara Kertagama, Babad Tanah Jawi, atau Serat Centini yang ditulis Ranggawarsita serta Wedhatama karangan Sri Mangkunegara IV. Pada abad ke-20 muncul pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Ki Ageng Soerjomentaram. Semua penulis tersebut memiliki latar belakang kraton -baca ia merupakan orang-orang yang berasal dari lapisan sosial kelas atas (Niels Mulder, 1996).

Tidak hanya nilai dan simbol yang ada di MMJT, nama-nama orang juga terbentuk dari kebudayaan mereka sendiri. Karenanya secara sederhana nama-nama tersebut memiliki makna yang turut membedakan antara kelas atas dan *wong cilik*. Nama-nama kelas atas cenderung mengacu pada nama-nama bernilai luhur -bahkan merepresentasikan kedudukan sosial- sebagai wujud dari tujuan kehidupan yang lebih bersifat vertikal. Sebaliknya, nama-nama *wong cilik* lebih mengacu pada keadaan hidup mereka sehari-hari -atau pengalaman hidup yang “tertindas”- hingga muncul nama Tumbu, Prihatin, Cikrak, Bedjo, Paidjo, Painten, Ngatinah, atau nama-nama lainnya. Realitas ini secara kritis telah diteliti oleh Widodo; dan ia menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut memang menunjukkan selera budaya dan cita-cita luhur masyarakat (Sahid Teguh Widodo, 2013).

Keberbedaan seringkali juga diwujudkan dalam bahasa yang digunakan setiap lapisan sosial tersebut. Kelas atas memakai bahasa halus yang eksklusif yang identik untuk kalangan kraton; sedangkan bahasa kasar relatif digunakan oleh kalangan *wong cilik* dan bahasa inilah yang banyak dipakai oleh MMJT. Tidak hanya itu, perbedaan juga dilakukan melalui gelar-gelar khusus sebagai wujud lapisan atau tingkat sosial seseorang. Oleh karenanya, *wong cilik* yang ingin mendapatkan gelar tertentu perlu melalui proses yang sangat berat. Pada saatnya ia akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat -yaitu konteks MMJT. Meski telah mengalami banyak perubahan pada pola pelapisan sosial MMJT, tapi tidak pada pembagian antara lapisan sosial kelas atas dan *wong cilik* yang masih terlihat jelas.

Berdasarkan realitas tersebut, peneliti melihat bahwa pandangan hidup yang berkembang di MMJT pada dasarnya bersumber dari hasil pemikiran kelas atas. Jika di baca secara makro yaitu masyarakat Jawa, maka sumber tersebut ialah kelompok elit terutama raja-raja Jawa dan punggawa-punggawanya. Meski di sisi yang lain, ada pula kontribusi *wong cilik*. Di MMJT sendiri, kelas atas tetap memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam memberi warna pada setiap produk nilai di tengah kehidupan kemasyarakatan. Namun pada konteks ini peneliti yakin jika falsafah (nilai dan norma) MMJT lahir sebagai bagian integral dari siklus kekuasaan kelas atas melalui kekuatan politiknya. Implikasinya, pandangan hidup MMJT lebih berorientasi untuk menjaga keamanan kekuasaan dan pengaruh diri mereka. Bahkan pandangan hidup menjadi media bagi kekuasaan untuk menjaga legitimasinya dengan menciptakan perbedaan nilai-nilai yang harus diikuti oleh masing-masing lapisan sosial MMJT.

Keberagamaan, Etos Kerja dan Kemiskinan dalam Struktur MMJT

Diskursus etos kerja *wong cilik* di MMJT memunculkan suatu konsepsi bahwa kerja bagi mereka dihayati sebagai kewajiban mutlak manusia. Bahkan ia seringkali dikorelasikan dengan nilai-nilai keberagamaan dirinya, sehingga kerja bagi mereka bermuatan ibadah. Etos kerja sebagai perwujudan tugas kehidupan dari MMJT bisa dilihat dari *sesanti* Jawa yang mereka pegang. Seperti *memayu hayuning bawana*; di mana segala kegiatan manusia diselaraskan dengan tujuan mulia untuk menyempurnakan kehidupan di bumi ini. Atau juga *sepi ing pamrih rame ing gawe*; di mana pamrih itu sudah terserap dalam tujuan mulia manusia, yaitu menyempurnakan kehidupan dengan jalan pengabdian, sambil menyangkal egoisme. Dengan demikian, MMJT memiliki prinsip yang menempatkan kerja sebagai bagian dari tatanan kehidupan mereka. Mereka hendak menyatukan kerangka dasar dimensi keduniawian dengan esensi kehidupan mereka seperti nilai keberagamaannya.

Konstruksi itulah yang membedakan MMJT dengan gagasan Barat tentang kerja yang cenderung dipisahkan dari esensi kehidupan. Bagi mereka - yaitu Barat sekuler- kerja merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya. Sementara bagi MMJT sendiri kerja - yang lazim dikatakan *gawe*- menyatu dengan hakikat kehidupan yang direpresentasikan melalui ritus-ritus hajatan atau keagamaan. Karenanya, kerja

terintegrasi ke dalam penghayatan hidup sebagai kegiatan penuh arti (untuk diri mereka dan juga orang lain). Bahkan ia tidak diisolasi hanya sebagai sarana menjamin kebutuhan-kebutuhan hidup dengan jumlah capaian sebanyak-banyaknya. Justru kerja, menurut simpulan riset Anshori, merupakan medium mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa (Nurani Siti Anshori, 2013). Lazim apabila Jatman juga menyimpulkan bahwasannya konsep *gawe* dalam masyarakat Jawa –baca di MMJT- di samping bersifat produktif sekaligus sosial dan religius (Jatman, 1993).

Berdasarkan realitas tersebut, kerja tidak terasing dari keseluruhan hidup MMJT, dan sebaliknya ia tidak merasa terasing di dalamnya. Atas dasar inilah, Magnis-Suseno menegaskan bahwa kiranya manusia Jawa sudah memiliki dasar-dasar untuk mengembangkan sikap-sikap kerja yang tidak hanya menghasilkan dan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, melainkan sungguh-sungguh sangat manusiawi (Franz Magnis-Suseno, 1992). Oleh karenanya, MMJT mengedepankan prinsip keselarasan antara nilai dan norma kehidupan diri mereka dengan orientasi kerja mereka. Dan tidak bisa dipungkiri jika keselarasan tersebut terus menjadi nilai normatif dalam tata dan pola kehidupan mereka sehari-hari.

Terkait dengan kemiskinan, pandangan hidup MMJT sangat erat dengan dua aspek penting, yakni masalah etos kerja dan tuntutan sosial yang berbalut nilai keagamaan. Meskipun antara keduanya terdapat relasi timbal balik yang sangat kuat, namun seringkali keduanya terpisah. Terlebih lagi, orang miskin di MMJT memiliki etos yang sangat lemah dan menganggap kondisinya sebagai takdir illahi. Kondisi ini bukan karena mereka tidak berhajat pada kecukupan materi, tapi lebih sebagai pemakluman atas kondisi kemiskinannya. Seakan-akan ada cukup alasan untuk tidak mengembalikan suatu kekurangan atau kelemahan dalam etos kerja MMJT pada mentalitas mereka. Terlebih lagi orientasi kehidupan mereka cenderung untuk mewujudkan ketenangan dan kepuasan batin. Hal ini yang diakui dalam riset Palikhah bahwa arti dan tujuan hidup bagi masyarakat miskin hanya diorientasikan untuk mencapai ketenangan dan kepuasan batin (Nur Palikhah, 2016).

Pandangan tersebut mempengaruhi etos kerja yang rendah dan bahkan menerima hidup “seadanya”. Kalaupun muncul etos yang tinggi disertai angan-angan atau harapan agar bisa hidup setara dengan orang kaya, masyarakat memandang ia bermulut besar –baca “*kumalungkung*”. Bagi orang miskin MMJT, mengharapkan kondisi yang dimiliki orang kaya merupakan kesalahan dan tidak tahu diri. Mereka menganggap bahwa kondisi kemiskinan merupakan kondisi yang telah ditetapkan sedemikian adanya –atau “*mung sakdermo nglakoni*”- dan juga telah ditakdirkan untuk terus kalah. Salah satu ungkapan yang seringkali didengar peneliti “*kridaning ati ora biso mbedah kuthaning pasti, budidayaning manungso ora biso ngungkuh garising kuwoso*” (keinginan yang keras, kehendak yang kuat, serta kemauan yang membaja tidak bisa melawan kehendak Tuhan). Ungkapan ini memiliki makna religius bahwa manusia telah ditetapkan kondisinya –termasuk kemiskinan- memang telah ditetapkan.

Salah seorang dari MMJT kepada peneliti menjelaskan bahwa orang miskin di MMJT kurang mempunyai rencana jangka panjang atas hidup diri dan keluarganya. Keadaan sehari-harinya hanya berpikir dan bertindak taktis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup saat ini –baca hari ini saja. Salah satu contoh dalam artikulasi seni, mereka membangun simbol kebudayaan bersifat sangat praktis yang tidak memerlukan proses dan perenungan yang panjang. Kesenian diciptakan sebagai pelipur rasa lelah atau lara bagi kesedihan kehidupan mereka. Begitu pula kesenian –dan juga tindakan- yang bernuansa keagamaan cenderung selaras dengan tradisi dan keadaan kehidupan mereka. Kerangka ini oleh Bauto dikatakan bahwa agama merupakan entitas final dan tertinggi untuk mencari makna hidup; bahkan ia sumber motivasi tindakan masyarakat yang terefleksi dalam kehidupan kesehariannya (Laode Munto Bauto, 2014).

Peneliti melihat jika kekurangan dalam segala dimensi yang memunculkan kemiskinan *wong cilik* di MMJT. Walaupun keinginan mereka sendiri agar ia jauh dari pusaran realitas kemiskinan, tetapi ia justru mendapat tekanan nilai, norma dan tradisi yang ditentukan oleh kelas atas. Seperti dalam tradisi keberagamaan kelas atas cenderung memiliki gaya dan tradisi yang tinggi; realitas ini bisa dilihat ketika MMJT memperingati hari besar keagamaan (maulid nabi, idul fitrih, idul adha, dan lain sebagainya) mewah dan bernuansa materialistik. Hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk tindakan mengkorupsi kualitas moral manusia, yaitu struktur-struktur kekuasaan yang eksplosif. Keberagamaan ini terintegrasi dalam diri MMJT dan bermetamorfosis menjadi realitas agama normatif. Memang, seperti simpulan riset Maulidia, agama akan tetap hidup di masyarakat sebab ia dibentuk dan berkembang dalam bingkai relasi antar subjek kemasyarakatan (Hanifa Maulidia, 2019).

Kondisi tersebut juga berimplikasi pada tanggungjawab sosial-keagamaan orang miskin MMJT yang tidak mempunyai kewajiban memberi sumbangan atau berkontribusi secara materi dalam jumlah besar. Kebutuhan mereka berkisar antara mempertahankan hidup dan bagian kecil lainnya untuk berbagi dengan sesama. Mereka akan lebih banyak menyumbang tenaganya untuk komitmen pada masyarakat dan diorientasikan untuk perwujudan sumbangan diri –atau shadaqah. Pada konteks yang demikian, orang miskin cenderung memposisikan dirinya sebagai objek keberagamaan kelas atas. Postulasi Karl Marx, seperti di dalam simpulan riset Farihah memiliki keselarasan bahwa agama pada dasarnya dikonstruks oleh manusia –atau masyarakat (Irzum Farihah, 2015). Peneliti menilai, keadaan inilah yang membentuk mentalitas orang miskin MMJT memiliki gaya keberagamaan pinggiran yang tidak memotivasi mereka untuk maju.

Oleh karenanya, orang miskin MMJT tidak haus pengakuan masyarakat dan terlebih merindukan pujian sepanjang hidupnya. Dipuji atau tidak dipuji, ia akan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak mendengar kata masyarakat atas perilakunya. Scott melihat fenomena tersebut sebagai pilihan rasional bagi orang miskin untuk dapat bertahan hidup dari kondisi kurangnya peluang yang mereka dapatkan. Tanggapan negatif atas diri mereka merupakan upaya untuk melegalkan kegiatan-kegiatannya yang menurut

masyarakat tidak patut (James C. Scott, 2000). Akhirnya motivasi - keberagaman dan kemasyarakatan- yang terbentuk tidak lebih sebagai dorongan etis kerja untuk bertahan hidup semata.

Begitu pula tradisi -baca kebudayaan- keberagaman yang terbentuk mengikuti standar kelas atas yang diwarnai pernak-pernik materialistik. Terlebih lagi secara teoritik, kebudayaan terus menerus merujuk pada kelompok sosial tertentu dalam kategori teritorial, etnik, atau bangsa (Dakir, 2017). Di MMJT sendiri, tradisi keberagaman yang berlapis budaya merujuk pada kelompok elit yang berada di lapisan sosial kelas atas. Dalam konsep kebudayaan (Mahmud & Zamroni, 2014), kenyataan tersebut dapat berbentuk sub-kultur sebagai budaya tandingan (*counter culture*) atas budaya dominan. Dalam konteks perkembangan budaya MMJT, budaya keberagaman pinggiran bagi orang miskin merupakan budaya tandingan atas nilai, norma, dan tradisi yang dibentuk kelas atas. Antar lapisan sosial sendiri kebudayaan tersebut berkembang secara harmonis, beriringan dan toleran.

Kemiskinan di MMJT sebenarnya merupakan fenomena yang muncul pada setiap rentang waktu sepanjang sejarah kemasyarakatan MMJT. Jika diruntut dari perspektif sejarah, memang pada masa kolonial kebijakan tanam paksa dan kerja rodi menjadikan masyarakat Jawa berada dalam kondisi kemiskinan. Hal ini mendorong adanya bentuk protes berupa pemberontakan-pemberontakan kecil terhadap penguasa kolonial. Kondisi-kondisi kemiskinan desa-desa Jawa selama masa kolonial tersebut melahirkan tulisan-tulisan kritis yang diangkat oleh para ahli sejarah seperti Sartono Kartodirjo, Soehartono, Umar Kayam dan penulis-penulis sejarah lainnya. Tulisan mereka rata-rata memunculkan suatu kesimpulan bahwa kemiskinan di Jawa merupakan hal yang terus berlangsung mulai zaman kolonial hingga saat ini dan merupakan proses ketidakadilan struktural. Namun, secara spesifik, fenomena kemiskinan MMJT dapat dilihat dari dari perspektif diri mereka sendiri.

Fenomena Kemiskinan dan Budaya Kemiskinan MMJT

Peneliti memberikan pernyataan tersebut tidak lepas dari konstruksi kemiskinan yang ada di MMJT sendiri. Realitas kemiskinan terbentuk tidak lepas dari kebudayaan -di dalamnya terdapat sikap keberagaman- yang menjadi landasan kehidupannya. Peneliti juga melihat, saat ini penduduk MMJT diselimuti oleh kemiskinan yang relatif akut. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang dijadikan sumber tenaga kerja murah. Pola yang seperti ini sebenarnya telah terjadi sejak lama dan dapat dilihat sejak pada sekitar tahun 1830-an ketika Belanda menggulirkan kebijakan *Hermoving* atau *Reorganizie*. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah penataan keorganisasian desa. Peneliti menilai, kebijakan ini berimbas pada tumbuhnya mentalitas pasif dan tidak kompetitif dalam diri MMJT. Pada gilirannya MMJT lebih nyaman bersikap pasif sebagai buruh kasar di perkebunan dan pertanian.

Proses pemiskinan MMJT memang ditandai dengan semakin banyaknya kuli trosor -yaitu petani yang tidak memiliki tanah garapan. Hal tersebut terjadi akibat mentalitas mereka yang tidak berkompetisi. Tidak berlebihan jika MMJT mempunyai sikap dan tindakan yang tidak menunjukkan progresivitas untuk

meningkatkan nilai kehidupan dirinya. Apabila dipahami secara komprehensif, realitas kemiskinan MMJT hanya sebagai produk dari pandangan hidup mereka sendiri, semisal pandangan *nrimo ing pandum*, *alon-alon wathon klakon*, atau *ono dino ono upa*. Pandangan-pandangan ini ternyata diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan seperti ikhlas, sabar, tawakal, atau takdir, sehingga pandangan tersebut kokoh berdiri diatas sakralitas keagamaan. Artinya, nilai-nilai keagamaan tersebut diposisikan sebagai legitimasi terhadap pandangan hidup MMJT; oleh karenanya menurut Asy'arie perlu ada upaya rasionalisasi doktrin agama yang terkait dengan etos kerja (Musa Asy'arie, 1994). Justru menurut simpulan riset Yulasteriyani bahwa kemiskinan muncul disebabkan manusia kurang bersyukur dan tidak berusaha untuk mencari rizqi Tuhan (Yulasteriyani & dkk., 2019).

Karenanya, budaya kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab tunggal atas kemiskinan di MMJT. Justru problematika kemiskinan MMJT bisa dipandang sebagai buah dari keterbelakangan kebudayaan masyarakat tersebut. Dari setiap kondisi kemiskinan di MMJT memperlihatkan sebab-musabab non-struktural yang lebih mendominasi daripada faktor struktural. Artinya, budaya dan pandangan hidup MMJT dapat dipandang sebagai faktor utama yang mengkonstruksi budaya kemiskinan. Pemahaman agama pun cenderung dipahami tidak sesuai dengan spirit transformasi sosial, bahkan tidak mampu diaplikasikan secara operasional. Bagi MMJT, religiusitas bagi MMJT lebih dimaknai dalam bentuk pelaksanaan ritual atau peribadatan semata.

Pada hakikatnya, budaya kemiskinan pada MMJT di komunitas lapisan bawah (*wong cilik*) pada dasarnya muncul akibat dari latar pemikiran yang pasif. Di sisi yang lain, berkembangnya budaya tersebut disebabkan adanya stigma kemiskinan yang dikelola oleh kekuasaan untuk menjelaskan kondisi kemiskinan yang berkembang terus tanpa ada titik akhir. Stigma budaya kemiskinan yang terdeteksi melalui pandangan hidup MMJT yang "*nrimo ing pandum*" dan percaya pada takdir yang bersifat *given*. Sikap "*fatalis*" yang berkembang di MMJT akhirnya mereproduksi budaya pasif dan tidak berhasrat untuk berkompetisi memperbaiki sikap hidup. Nilai budaya inilah yang terus berkembang di MMJT dan juga tumbuh efektif dalam diri personal MMJT. Kenapa demikian?, merujuk pada teori kebudayaan ada prinsip bahwa kebudayaan diperoleh dari belajar; menjadi milik bersama; menjadi pola; dan ia bersifat dinamis serta adaptif. Untuk melakukan transformasi tersebut, maka perlu adanya penanaman modal sosial dalam diri individu maupun kolektif sebagai strategi dalam penanggulangan kemiskinan, seperti yang disimpulkan dalam riset Nihayatul, dkk (Nihayatul et. al, 2019).

Berdasarkan pada prinsip kebudayaan tersebut, maka peneliti mencoba mengurai fenomena budaya kemiskinan di MMJT. *Pertama*, budaya kemiskinan diperoleh MMJT tidak diintrodusir dari luar, tetapi dari proses belajar. Artinya, budaya kemiskinan merupakan proses yang cukup panjang melalui proses belajar dari generasi ke generasi. Jika kita lihat dari tragedi kemiskinan MMJT yang terus muncul memperlihatkan proses pemaknaan terhadap kemiskinan yang telah mencapai titik kulminasi. Keadaan kemiskinan dan tafsirannya telah

diwariskan melalui berbagai cerita, simbol-simbol, dan juga ungkapan-ungkapan khusus. Salah satunya "*nrimo ing pandum*" merupakan ungkapan yang telah mengalami proses institusionalisasi, sehingga penduduk MMJT yang tidak mengikutinya akan mendapat sanksi sosial. Bahkan ia akan dikatakan banyak menuntut atau bisa dikatakan iri hati (*drengki-srei*) dan serakah jika tidak menerima nasib dan menuntut haknya. Oleh karenanya, MMJT lebih senang pada orang yang diam dan tidak terlalu banyak menuntut.

Kedua, budaya kemiskinan menurut *wong cilik* di MMJT merupakan milik bersama. Realitas ini mengandung makna, kebudayaan tidak lahir jika seseorang hidup sendiri. Pemaknaan kemiskinan tidak hanya mutlak tafsir personalitas -dari orang per orang-, tetapi ia merupakan produk bersama. Pengalaman personalitas MMJT yang mengalami kemiskinan diantisipasi oleh kalangan pemuda melalui penciptaan idiom-idiom untuk mengurangi dampak stress atau kekecewaan yang berkepanjangan. Hal tersebut juga terkait dengan pandangan untuk menjaga stabilitas atau keharmonisan masyarakat. Karenanya, dalam riset Kuswaya & Ma'mun menyatakan bahwa konsep ini bisa menjadi ketahanan manusia dalam mengarungi kehidupannya (Adang Kuswaya & Sukron Ma'mun, 2020). Namun tragisnya, *nrimo ing pandum* ini oleh MMJT dijadikan legitimasi atas kondisi kemiskinan diri mereka. Implikasinya, MMJT tidak gampang untuk menyalahkan orang lain yang dapat menimbulkan konflik sosial. Tekanan pada kebersamaan dan harmonisasi sosial bagi mereka sangat kuat di MMJT tersebut.

Ketiga, kebudayaan kemiskinan sebagai pola bagi *wong cilik* MMJT. Hal ini mengandung pengertian, kebudayaan di MMJT memiliki pola yang sangat unik. Ungkapan-ungkapan Jawa lebih kerap diarahkan pada pembatasan ekspresi diri daripada sebagai media protes. Tidak mengherankan jika pernyataan-pernyataan bernada fatalistis muncul agar tidak terjadi gejolak sosial. Walaupun hakikatnya, pandangan, sikap maupun tindakan *wong cilik* MMJT yang muncul dan dijiwai ungkapan-ungkapan Jawa tersebut bukan pembenar bagi keadaan miskin. Tetapi ia merupakan respon kognitif yang diorientasikan pada pembentukan sikap hidup yang arif dalam menyikapi keadaan. Bahkan tafsir atas doktrin agama juga turut mewarnai pandangan-pandangan tersebut terutama tafsir yang bernuansa diskriminatif.

Itulah sebabnya, ada kalangan yang tidak membenarkan bila dengan merujuk ungkapan-ungkapan Jawa -terlebih pada tafsir keagamaan-, lantas dengan mudah mengatakan bahwa budaya kemiskinan itu tumbuh berkembang dan melekat permanen dalam jantung kehidupan MMJT. Walaupun pada dasarnya, seperti yang diungkap kalangan tertentu kepada peneliti, kemiskinan di Jawa -baca di MMJT- lebih banyak disebabkan oleh struktural sosial yang rentan konflik. Padahal orang MMJT sendiri sangat menjaga harmonisasi masyarakat daripada konflik yang dapat terjadi jika tuntutan-tuntutan dibiarkan terbuka. Budaya kemiskinan ternyata lebih merupakan benteng pengendalian diri yang halus demi menjaga harmonisasi sosial agar tidak terjadi *chaos* dalam konteks hubungan sosial. Didalamnya pun ia masih menyimpan harapan adanya perubahan yang diupayakan untuk kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, jika kebudayaan kemiskinan yang

sudah terpola dan terbakukan dalam pandangan tersebut bergeser dari pengertian asalnya. Budaya kemiskinan akhirnya muncul merepresentasikan dirinya sebagai subkultur yang ditandai oleh kemalasan, pemborosan, tindak kejahatan dan kekerasan terhadap kelas atas, kumuh dan jorok, perilaku kasar, dan tidak berorientasi ke masa depan.

Pola kebudayaan MMJT sendiri menekankan pada penjagaan hubungan sosial yang harmonis merupakan dambaan kehidupan spiritual orang MMJT itu sendiri. Itulah sebabnya kehidupan ekonomi bermuara pada aspek harmonisasi sosial yang berlandaskan nilai kekeluargaan. Dalam menjalankan roda ekonomi, MMJT berprinsip *luwih becik kalah uwang tinimbang kalah uwong* (lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan saudara). Bahkan secara umum, MMJT –baca masyarakat Jawa- juga mengembangkan pandangan Jawa, yaitu: *tuna satak bathi sanak*. Prinsip ini bermakna bahwa kerugian harta tak dianggap fatal bila dibanding kehilangan saudara (*sedulur*) (Endaswara, 2006).

Keempat, kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif; berarti kebudayaan kemiskinan tidak tetap adanya dan akan terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Jika kita urai lebih jauh tentang stigma kemiskinan yang cenderung dianggap sebagai budaya kemiskinan, maka keberadaannya sangat dinamis dalam perkembangan MMJT. Sebagai media untuk menjaga kestabilan sosial dan menyembunyikan ketimpangan struktural, maka stigma tersebut dalam setiap masa memiliki sifat berbeda. *Nrimo ing pandum* dulu dianggap usaha kekuasaan untuk mengesahkan penghisapan atas rakyat melalui kebijakan yang tidak memihak wong cilik. Saat ini prinsip tersebut dianggap untuk mengesahkan kondisi kemiskinan yang tidak berubah meski kekuasaan berubah.

Untuk menganalisis bagaimana stigma budaya kemiskinan terpelihara dan terus mendapatkan bentuk yang aktual dengan berbagai artikulasinya. Peneliti menggunakan teori mikro tentang kemunculan dan pemeliharaan budaya, yaitu: *Knowledge-Based Affect Theory* yang ditawarkan Loren Demerath. Menurut diri Loren, produksi budaya hakikatnya merupakan proses artikulasi, tipikalisasi, dan mengorientasi pengalaman untuk membuatnya berarti. Produksi budaya tersebut merupakan proses kognitif dan afektif sebagai dasar bagi tindakan seseorang (Loren Demerath, 2002). Melalui teori ini dapat dimunculkan dua asumsi, yaitu: semakin penduduk MMJT tahu terhadap sesuatu, maka semakin mudah dengan menguatkan pengetahuan tersebut, dan/atau menjadi semakin khawatir dengan adanya kontradiksi; MMJT dimotivasi untuk memanipulasi pengetahuannya agar sesuai dengan pengalaman dirinya, sehingga ia bisa meningkatkan pemahaman subyektif atas pengalaman dan mendorong pengertian. Dengan semakin paham atas sesuatu, maka mereka akan semakin mudah mengambil pilihan atas masalah kehidupannya. Demikian juga pengetahuan terus menerus didorong untuk berubah melalui manipulasi agar cocok dengan pengetahuan terkini. Proses tersebut berjalan bersamaan dan menjadikan budaya yang terus terbarukan.

Berdasarkan asumsi tersebut nyata apabila kebudayaan miskin terdapat proses artikulasi, tipikalisasi, dan orientasi. Dalam proses artikulasi terdapat daya upaya dalam pengalaman hidup MMJT yang cukup unik. Artikulasi

kebudayaan kemiskinan MMJT ini berasal dari pengalaman hidup yang telah diartikan dalam satu pengalaman dengan pengalaman lainnya. Walaupun setiap pengalaman memunculkan perbedaan-perbedaan yang terartikulasi. Masalah kemiskinan di MMJT yang semakin masif pada setiap masa berimplikasi terhadap pembentukan tanggapan rasional. Masyarakat akan mencari pemahaman yang benar atas kondisi tersebut atau sebaliknya masyarakat membentuk nilai pembenar (seperti munculnya prinsip *nrimo ing pandum*) sebagai artikulasinya. Ungkapan ini pada awalnya sebagai respon kognitif atas kondisi ketiadaan dan kepapaan, namun masifnya pengalaman membentuk sikap batin yang kuat dalam rangka mencari kenikmatan spiritual. Ungkapan *nrimo ing pandum* pada akhirnya dihayati sebagai simbol pembelajaran diri untuk tidak serakah; *pekpinek barang liyan* (menggambil hak yang bukan haknya).

Dari proses artikulasi tersebut, MMJT mengekspresikan penggunaan arti (atau makna) artikulasi sebagai bentuk tendensi sentral tindakannya. Inilah yang disebut sebagai tipikalisasi; proses ini memberi tanda atau kategorisasi pada setiap pengalaman dari proses artikulasi, sehingga ia memiliki tipikal tertentu yang mampu mengarahkan sikap dan tindakannya. Kemiskinan MMJT yang berlangsung lama memunculkan proses tipikasi -baca menginternal-kemiskinan di dalam struktur sosial MMJT itu sendiri. Kondisi kemiskinan yang hadir di setiap masa dan berjalan stabil, justru mendorong munculnya tipikal kemiskinan di MMJT. Hal ini terjadi untuk memberikan pengesahan atas adanya kemiskinan di MMJT di mana kehadirannya perlu dimaknai sebagai keadaan yang wajar. Pola inilah yang memunculkan, seperti yang dikatakan Palikhah disebut, kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang muncul akibat dari nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut orang miskin (Palikhah, 2016).

Tragisnya, wong cilik MMJT melakukan pengayaan arti terhadap ekspresi dari artikulasi pengalaman tersebut -ini yang disebut sebagai orientasi. Dari pengayaan ini, pengalaman dari kemiskinan tersebut benar-benar memiliki arti yang sangat kuat dalam diri MMJT. Orientasi ini berisi tanggapan MMJT terhadap dampak dari kemiskinan yang berlangsung terus menerus. Kemiskinan telah mempengaruhi kehidupan wong cilik MMJT berupa akibat penyakit dan kematian, atau akibat buruk lainnya. Bahkan membentuk mentalitas negatif, yaitu: mental yang mengarahkan orientasi nilai pasrah pada nasib; ini merupakan upaya menghibur diri mereka melalui pandangan-pandangan penyejuk jiwa seperti "*nrimo ing pandum*". Ketidakberdayaan terhadap realitas kemiskinan diri mereka dikemas dengan bahasa agama seperti takdir, sabar, atau ikhlas. Lahirlah sikap dan tindakan yang dianggap sebagai wujud pengabdian diri mereka kepada Tuhan melalui kemiskinan.

Berdasarkan deskripsi tersebut nyata jika wong cilik MMJT mempunyai pandangan-pandangan pasif terhadap kompetisi realitas sosial dirinya. Dalam *The Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro* fenomena tersebut disebut sebagai budaya kemiskinan. Budaya ini walaupun berfungsi sebagai sarana untuk menafsirkan realitas sosial dalam bentuk yang melayani kepentingan-kepentingan sosial mereka yang berkuasa (Janice E. Perlman,

1979). Tetapi ia memberikan deskripsi kritis terhadap fenomena tersebut untuk diupayakan adanya proses transformatif budaya pasif ke aktif. Karena itu konsep budaya kemiskinan di MMJT perlu perubahan pandangan dan penafsiran baru termasuk juga terhadap nilai-nilai agama. Jika demikian adanya dapat dipahami jika budaya kemiskinan tidaklah pernah lahir dari rahim MMJT, namun ia merupakan stigma pembenar atas ketidakberdayaan diri *wong cilik* MMJT terhadap realitas; atau bahkan ia bisa juga dikatakan merupakan legitimasi ketimpangan struktural yang terjadi dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Melihat deskripsi tersebut, MMJT mempunyai budaya kemiskinan yang terbentuk sejak lama dan mempengaruhi mentalitas mereka. Karenanya, budaya kemiskinan yang lahir dari rahim pandangan diri mereka terhadap realitas sosial kemasyarakatan perlu direkonstruksi. Mentalitas *wong cilik* -baca masyarakat miskin- MMJT yang memunculkan sikap dan tindakan sangat mempengaruhi spirit dan etos kerjanya. Orientasi ekonomi mereka sangat kuat ditumbuhkan oleh pandangan hidup mereka yang cenderung dijiwai ungkapan-ungkapan Jawa dan dikaitkan dengan hasil intepretasi doktrin keagamaan.

Wajar jika MMJT cenderung mengaitkan antara ungkapan Jawa dengan doktrin agama disebabkan oleh interpretasi yang bernuansa patah semangat. Tanpa mengulas kembali hasil intepretasi tersebut, *wong cilik* MMJT menganggap telah menemukan pandangan yang benar. Seperti halnya dengan mental fatalistik (*nrimo ing pandum*) dianggap pengertiannya sama dengan nilai-nilai agama seperti sabar dan ikhlas. Tanpa berpikir kritis lagi, kemiskinan dianggap sebagai realitas yang tidak bisa diupayakan untuk ditransformasi. Bagi mereka, hidup harmonis dengan sesama (kelas atas maupun kelas bawah) di tengah masyarakat merupakan tujuan tertinggi. Hidup miskin tidak menjadi persoalan yang penting bisa hidup rukun dan penuh dengan nilai toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Adim. (2019). Perilaku Ekonomi dan Keberagamaan Komunitas Pedagang Banjar dalam Perspektif Sufistik. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 17(1), 107-136.
- Adang Kuswaya & Sukron Ma'mun. (2020). Misinterpretation of Patience: an Analytical Study of Nerimo Concept within Indonesian Muslim Society. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 153-176.
- Anthony Elliott & Charles Lemert. (2006). *The New Individualism: The Emotional Costs of Globalization*. London: Routledge.
- Baharun, H. (2019). Management information systems in education: the significance of e-public relation for enhancing competitiveness of higher education. *Journal of Physics: Conference Series*, 1175(1).
- Berger, P. L. (2004). *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.

- Dakir, D. (2017). Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 28–54. <https://doi.org/10.15642/religio.v7i1.707>
- Dakir, & Fauzi, A. (2019). Epistemologi Pendidikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin di Era Revolusi Industri 4.0; Sebuah Kajian Paradigmatik. *Edureligian: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 92–100. Retrieved from <http://jurnaljpi.com/index.php/JPI/article/view/28>
- Endaswara, S. (2006). *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Franz Magnis-Suseno. (1992). *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia.
- Giddens, A. (2009). *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Green, D. (2008). *From Poverty to Power: How Active Citizens and Effective States Can Change The World*. England: Oxfam International.
- Hanifa Maulidia. (2019). Relasi Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Emile Durkheim dan Karl Marx. *Jurnal Sosiologi USK*, 13(2), 183–200.
- Husna Ni'matul Ulya. (2018). Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *Al-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 129–153.
- Irzum Fariyah. (2015). Filsafat Materialisme Karl Marx: Epistemologi Dialectical and Historical Materialism. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(2), 431–454.
- James C. Scott. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- James M. Henslin. (2007). *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga.
- Janice E. Perlman. (1979). *The Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro*. London: University of California Press.
- Jatman, D. (1993). *Sekitar Masalah Kebudayaan*. Bandung: Alumni.
- Johannes Muller. (2006). *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lailul Ilham & Ach. Farid. (2019). Kebahagiaan dalam Perspektif Masyarakat Marjinal: Studi Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 13(2), 95–124.
- Laode Munto Bauto. (2014). Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11–25.
- Latifah, E. (2011). Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang Berorientasi pada Millenium Development Goals. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 402–413.
- Loren Demerath. (2002). Epistemological Culture Theory: A Micro Theory of the Origin and Maintenance of Culture. *Journal of Sociological Theory*, 20(2), 208–226.
- Lubis, Z. (2011). Problema Sosial, Pandangan Hidup dan Konsep Kebudayaan. *Antropologi Indonesia: Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*,

- 32(3), 240–249.
- M. Muslich. (2004). Pandangan Hidup dan Simbol-Simbol dalam Budaya Jawa. *Millah: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 203–220.
- Mahmud, M. E., & Zamroni. (2014). Peran Masjid dalam Pengembangan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural Pada Masyarakat. *Fenomena*, 6(1), 155–170.
- Masrial. (2018). Menguak Fenomena Kemiskinan dan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Nelayan di Teluk Buo. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 6(2), 135–149.
- Maulana, A. (2019). Analisis Elastisitas Investasi dengan Penurunan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1), 1–12.
- Musa Asy'arie. (1994). Ekonomi dan Kemiskinan Tinjauan Agama. *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(14), 36–46.
- Niels Mulder. (1996). *Pribadi dan Masyarakat di Jawa: Penjelajahan Mengenai Hubungannya, Yogyakarta, 1970-1980*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nihayatul, F., & dkk. (2019). Spiritualitas Agama dan Etos Kerja Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 13(1), 8–14.
- Nurani Siti Anshori. (2013). Makna Kerja (Meaning of Work): Suatu Studi Entografi Abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Industri Dan Organisasi*, 2(3), 157–162.
- Nur Palikhah. (2016). Konsep Kemiskinan Kultural. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(30), 11–27.
- Paul B. Horton & Chester L. Hunt. (1990). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Rusman Rasyid & Mohd. Fuat Mat Jali. (2014). Analisis Pola Kemiskinan Masyarakat Bandar Makassar Negeri Sulawesi Selatan. *1st Academic Symposium Integrating Knowledge UIN Makasar*, 205–212. Makasar: UIN Makasar.
- Sahid Teguh Widodo. (2013). Konstruksi Nama Orang Jawa: Studi Kasus Nama-Nama Modern di Surakarta. *Humaniora*, 25(1), 82–91.
- Tania Murray Li. (2012). *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Tim Penulis. (2009). *Rethinking Poverty: Report on the World Social Situation 2010*. New York: United Nation.
- Tri Rejeki Andayani, & dkk. (2019). Konsep kemiskinan (Subjektif) dalam Benak Masyarakat Indonesia: Konstruksi dan Indikatornya. *Jurnal Psikologi Sosial*, 17(2), 75–85.
- Ulfi Putra Sany. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32–44.
- Warto. (2015). Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulannya. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 20–29.
- Yulasteriyan, & dkk. (2019). Kemiskinan Masyarakat di Indonesia: Perspektif Sosiologi Islam dan Fenomenologi Barat. *Intizar*, 25(2), 77–86.